



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

विनयवन्तः अहमि स्यात्पुनः कर्मणि के वा लुक् कश्चिन्नादि

Jl. Kenari 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telepon (0274)51586,562682

EMAIL : dinsosnakertrans@jogjakota.go.id

SURAT PESANAN	SATUAN KERJA : DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA YOGYAKARTA			
	DAFTAR PRODUK PAKET : JKR-P2201-189498			
	NOMOR DAN TANGGAL SURAT PERJANJIAN : 02/SP/Js-Keamanan/I/2022 03 Januari 2022			
Yang bertanda tangan di bawah ini:				
Nama : RR SUTINI SRI LESTARI, SH.,M.Si				
Jabatan : Sekretaris Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pekerjaan Belanja Jasa Tenaga Keamanan				
Alamat Instansi : Jl. Kenari No.56 Kota Yogyakarta selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;				
Nama : LUCKY NOVADANI				
Jabatan : Direktur Utama, PT. Berdikari Karya Tunggal				
Alamat : Jl. Kalak Ijo RT.02 Guwosari, Pajangan, Bantul selanjutnya disebut sebagai Penyedia;				
untuk mengerjakan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:				
RINCIAN PEKERJAAN :				
Daftar Produk PAKET JKR-P2112-154081				
No	Nama Produk	Kuantitas	Harga satuan (Rp.)	Total (Rp.)
1.	85250-JKR-002085492 Jasa Keamanan	108 ob	3.298.000	356.184.000
Terbilang: Tiga ratus Lima Puluh Enam Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah (termasuk pajak).				
SYARAT DAN KETENTUAN:				
1. Hak dan Kewajiban				
Penyedia mempunyai hak:				
a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Surat Perjanjian ; dan				
b. memperoleh fasilitas dari Pejabat Penandatanganan Surat Perjanjian untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Surat Perjanjian .				
Penyedia mempunyai Kewajiban:				
a. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perjanjian ;				
b. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian ;				
c. Penyedia bertanggungjawab/berkewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kualitas, ketepatan volume, ketepatan waktu pelaksanaan/penyerahan dan ketepatan tempat pengiriman/penyerahan hasil pekerjaan.				
d. Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen Surat Perjanjian atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan Surat Perjanjian untuk				

- kepentingan pihak lain.
- e. Penyedia berkewajiban untuk melindungi Pejabat Penandatanganan Surat Perjanjian dari segala tuntutan atau klaim dari pihak lain atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual.
 - f. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam Surat Perjanjian ;
 - g. memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatanganan Surat Perjanjian ;
 - h. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal dan tempat penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian ;
 - i. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia; dan
 - j. menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*).

Pejabat Penandatanganan Surat Perjanjian mempunyai hak:

- a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
- b. meminta laporan-laporan yang tercantum di dalam Surat Perjanjian mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
- c. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian esifikasi dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian .
- d. mengenakan sanksi kepada Penyedia;
- e. memberikan instruksi;
- f. mengusulkan pengenaan sanksi daftar hitam;
- g. menyetujui adendum/perubahan Surat Perjanjian ;
- h. menerima jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, dan jaminan pemeliharaan (apabila ada); dan/atau
- i. menilai kinerja Penyedia.

Pejabat Penandatanganan Surat Perjanjian mempunyai kewajiban:

- a. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Surat Perjanjian dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
- b. membayar uang muka (Apabila dipersyaratkan);
- c. membayar penyesuaian harga;
- d. membayar ganti rugi karena kesalahan yang dilakukan Pejabat Penandatanganan Surat Perjanjian .

2. Lingkup Pekerjaan

Pengamanan pada beberapa lokasi meliputi:

- a. UPT RPSLU Budi Dharma, Ponggalan UH VII/203, Giwangan;
- b. UPT RPA Wiloso Projo, Gowongan Lor No.211, Jetis

3. Jangka Waktu Pelaksanaan

- a. Surat Perjanjian ini berlaku sejak tanggal penandatanganan.
- b. Waktu pelaksanaan pekerjaan dimulai pada tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.
- c. Pejabat Penandatanganan Surat Perjanjian menerbitkan SPMK
- d. Tanggal penandatanganan SPMK oleh Pejabat Penandatanganan Surat Perjanjian ditetapkan sebagai tanggal mulai berlaku efektif Surat Perjanjian .

4. Penghentian dan Pemutusan Surat Perjanjian

- a. Penghentian Surat Perjanjian dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar
- b. Pemutusan Surat Perjanjian dapat dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan Surat Perjanjian atau Penyedia.
- c. Pejabat Penandatanganan Surat Perjanjian dapat memutuskan Surat Perjanjian secara sepihak apabila Penyedia tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam Surat Perjanjian .
- d. Penyedia dapat memutuskan Surat Perjanjian secara sepihak apabila Pejabat Penandatanganan Surat Perjanjian tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam Surat Perjanjian .
- e. Pemutusan Surat Perjanjian dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah Pejabat Penandatanganan Surat Perjanjian /Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Surat Perjanjian secara tertulis kepada Penyedia/Pejabat Penandatanganan Surat Perjanjian .
- f. Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

- Pejabat Penandatanganan Surat Perjanjian dapat memutuskan Surat Perjanjian ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
- 1) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
 - 2) Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
 - 3) Penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 4) Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Surat Perjanjian ;
 - 5) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 6) Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
 - 7) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 8) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan Surat Perjanjian , Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang ditentukan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - 9) Penyedia menghentikan pekerjaan melebihi waktu yang ditentukan.
- g. Dalam hal terjadi pemutusan Surat Perjanjian , maka:
- 1) Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
 - 2) Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- h. Pejabat Penandatanganan Surat Perjanjian membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatanganan Surat Perjanjian sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Surat Perjanjian dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perjanjian dan selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatanganan Surat Perjanjian .
- i. Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Surat Perjanjian melalui pemberitahuan tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perjanjian apabila:
- 1) Pejabat Penandatanganan Surat Perjanjian memerintahkan Penyedia secara tertulis untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama waktu yang disepakati; atau
 - 2) Pejabat Penandatanganan Surat Perjanjian tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.
- j. Dalam hal pemutusan Surat Perjanjian maka Pejabat Penandatanganan Surat Perjanjian membayar kepada Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatanganan Surat Perjanjian sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Surat Perjanjian dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perjanjian dan selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatanganan Surat Perjanjian .
- k. Surat Perjanjian berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Surat Perjanjian sudah terpenuhi.
- l. Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan Surat Perjanjian .
- 5. Jaminan**
- a. Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perjanjian sebelum penandatanganan Surat Perjanjian , sebesar 5% dari nilai pekerjaan atau sebesar Rp. 17.809.200,- (Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah).
 - b. Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan yaitu tanggal 3 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.
 - c. Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen).
- 6. Laporan Hasil Pekerjaan**
- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Surat Perjanjian untuk menetapkan volume pekerjaan atas kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
 - b. Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian, dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan.
 - c. Laporan dibuat oleh Penyedia, apabila diperlukan pemeriksaan dilakukan oleh unsur

pengawas (apabila ada) dan disetujui oleh Pejabat Penandatanganan Surat Perjanjian .

7. Personel dan/atau Peralatan

- a. Personel dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.
- b. Penggantian Personel tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis Pejabat Penandatanganan Surat Perjanjian .
- c. Penggantian Personel dilakukan oleh Penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perjanjian beserta alasan penggantian.
- d. Pejabat Penandatanganan Surat Perjanjian dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian Personel menurut kualifikasi yang dibutuhkan.
- e. Pejabat Penandatanganan Surat Perjanjian dapat meminta pergantian Personel apabila menilai bahwa Personel:
 - 1) tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
 - 2) berkekelakuan tidak baik; atau
 - 3) mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.
- f. Jika penggantian Personel perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari Personel yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh Pejabat Penandatanganan Surat Perjanjian .
- g. Personel berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya.

8. Pembayaran

- a. Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya ini **TIDAK DIBERIKAN UANG MUKA**;
 - 1) Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan secara bulanan, dibayar berdasarkan perhitungan progress pekerjaan yang dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan dan disetujui oleh Pejabat penandatanganan Kontrak
 - 2) Pembayaran dapat dilakukan sebelum tanggal 31 Desember 2022, dengan ketentuan Penyedia Jasa harus menyerahkan Jaminan dari Bank dengan perhitungan sebesar pekerjaan yang belum dilaksanakan, yaitu sebesar **Rp. 29.682.000,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah)**

9. Masa Transisi

- a. Masa transisi adalah waktu antara berakhirnya Surat Perjanjian ini (31 Desember 2022) sampai dengan waktu mulai Surat Perjanjian selanjutnya pekerjaan ini pada tahun 2023.
- b. Penyedia wajib melaksanakan pekerjaan pada masa transisi maksimal 7 hari kalender apabila belum ada Surat Perjanjian baru.
- c. Jika masa transisi atas pekerjaan ini melebihi tujuh hari kalender dan kewajiban penyedia lama telah dilaksanakan maka pelaksanaan selanjutnya menjadi tanggungjawab PPKom.

10. Harga

- a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada Surat Perjanjian ini.
- b. Harga Surat Perjanjian telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya *overhead*, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
- c. Rincian harga Surat Perjanjian sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

11. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan Surat Perjanjian. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga Surat Perjanjian.

12. Pengalihan dan/atau subSurat Perjanjian

- a. Pengalihan seluruh Surat Perjanjian hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Surat Perjanjian dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Surat Perjanjian untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 - 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Surat Perjanjian dapat dilakukan untuk barang/jasa

yang bersifat tidak standar.

13. Perubahan Surat Perjanjian

- a. Surat Perjanjian hanya dapat diubah melalui adendum Surat Perjanjian.
- b. Perubahan Surat Perjanjian dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 15(lima belas) hari kerja;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui *e-Purchasing* dan Surat Perjanjian ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) menjual barang melalui proses *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta Surat Perjanjian esifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1) peringatan tertulis;
 - 2) denda; dan
 - 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*; atau
 - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (*e-Catalogue*).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang *e-Purchasing*.

15. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Surat Perjanjian ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian ini untuk setiap hari keterlambatan.

16. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Surat Perjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan Surat Perjanjian.

17. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Surat Perjanjian ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri terdekat dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

18. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam

bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari Surat Perjanjian ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap Surat Perjanjian ini.

19. Masa Berlaku Surat Perjanjian

Surat Perjanjian ini berlaku sejak tanggal Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kota Yogyakarta
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian



RR. Surtal S Lestari, SH., M.Si
PPKom

Untuk dan atas nama Penyedia Jasa
PT. Berdikari Karya Tunggal



LUCKY NOVADANI
Direktur Utama